RENJA 2019

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN

JALAN SOEMARGO NO.2 LAMONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 merupakan rencana tahunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja PD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2019 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonrsia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yang berisi program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025.
k. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
l. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan DaerahNo 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021.
m. Peraturan Bupati Lamongan No.69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah untuk menselaraskan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2019

b. Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan pelaksanaan target kinerja tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Lamongan selama tahun 2019;
3. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
4. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

Pada Tahun 2017 total anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebesar 11.746.356.400,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 6.007.276.400,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.739.080.000- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 57 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.865.770.372,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,64%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan

dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja 2018 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2017 dan pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
(terlampir)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perikanan Kbaupaten Lamongan didukung oleh 10 program, dimana di dalamnya terdiri dari 5 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
   f. Program Pengembangan Data atau Informasi
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, memiliki 57 kegiatan yang terdiri dari 23 kegiatan pendukung dan 34 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
b. Adanya pencairan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan cash budget yang telah ditetapkan sehingga tidak berakibat pada penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun, sehingga kegiatan terlaksana dengan baik

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan, dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi yang terdiri dari :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan
c. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan, dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu Sampai Hilir
d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam Batas Kewenangan Daerah
e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan pesisir serta pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan daerah

Dalam Hal penentuan indicator kinerja, Dinas Perikanan dalam hal penentuan indicator kinerja mengacu kepada kerangka fungsi dan tugas pokok Dinas Perikanan yaitu sebagai leading sector dalam penentuan kebijakan serta program dalam membangun masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Guna mewujudkan masyarakat perikanan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lamongan yang sejahtera, maka Dinas Perikanan telah menetapkan target indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Srategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan, dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Perikanan.

Yang mana Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten, berdasarkan peraturan tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki fungsi yaitu :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan
c. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan, dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu Sampai Hilir
d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam Batas Kewenangan Daerah
e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan pesisir serta pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki beberapa isu-isu strategis dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Lamongan. Isu isu strategis tersebut dapat kami jabarkan sebagai berikut :

Hambatan Faktor internal Dinas Perikanan adalah :

a. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan, hal ini dikarenakan luasnya wilayah cakupan potensi perikanan kabupaten Lamongan yang terdiri dari 20 Kecamatan

yang berpotensi perikanan namun hanya dilayani oleh 16 orang tenaga penyuluh.

b. Jumlah penyuluh yang ada sekarang,sebagian besar merupakan tenaga penyuluh dengan keahlian dalam bidang budidaya sehingga dapat disimpulkan dalam bidang pelayanan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang penyuluhan belum maskimal karena kekurangan personil para penyuluh dengan spesifikasi keahlian di bidang perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan.
c. Kurangnya jumlah tenaga staff yang terdapat dalam setiap bidang.

Hambatan Faktor Eksternal Dinas Perikanan adalah :

a. Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan
b. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat nelayan baik berupa pemberian jaminan social bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
c. Banyaknya fasilitas tambat labuh perahu dan alur perahu yang megalami pendangkalan dan erosi
d. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya seiring berkembangnya industri dan kawasan pemukiman serta sering terjadinya banjir di wilayah bonorowo
e. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehinggan masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
f. Diversifikasi hasil olahan produk perikanan dan belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
g. Lemahnya distribusi pasar komoditas hasil perikanan serta masih rendahnya keasadaran masyarakat akan pentingya konsumsi ikan di masyarakat
h. Belum optimalnya kawasan konservasi daerah sehingga jumlah kawasan potensial sebagai konservasi mangrove ataupun terumbu karang yang rusak bertambah (Perda Prov.Jatim No.1 Tahun 2018)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada point ini akan dilakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD berdasarkan hasil dari Forum PD yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan guna menyaring aspirasi serta program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, unit pelaksana teknis, serta para pemangku kepentingan. Dari rancangan awal usulan RKPD yang telah disusun oleh Dinas Perikanan berdasarkan pada hasil forum PD yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan diperoleh hasil bahwa rancangan awal RKPD Dinas Perikanan dilaksanakan dengan 9 program kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 11.221.666.000,- Rancangan awal tersebut kemudian ditindak lanjuti Dinas Perikanan dengan melakukan perbandingan dengan hasil forum Kabupaten Lamongan serta berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Lamongan melalui rapat dinas dengan para kabid serta para pemangku kepentingan guna penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta mengacu pada analisa kebutuhan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan serta mengacu pada kepada ketersediaan pagu anggaran yang diberikan sehingga kegiatan yang dihasilkan akan bermanfaat serta efektif secara signifikan dalam pengembangan potensi dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Setelah dilakukan perevisian dengan analisa kebutuhan dan ketersediaan pagu anggaran maka dapat diperoleh usulan rancangan akhir dengan usulan dana sebesar Rp. 10.689.396 dengan 9 program kegiatan. Di mana selama proses penyusunan usulan kegiatan sehingga menjadi rancangan akhir RKPD terdapat program dan kegiatan yang dilakukan penghapusan ataupun penambahan kegiatan baru yang memang dibutuhkan dalam mempercepat pencapaian target dan pembangunan sector kelautan dan Perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagaimana terdapat di dalam lampiran tabel sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Lamongan
(terlampir)

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujuakan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Sebagai pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan masyarakat perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya kegiatan musyawarah dalam penentuan program dan kegiatannya. Musyawarah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan forum PD guna menyaring aspirasi dan usulan kegiatan yang prioritas untuk mengatasi permasalahan yang ada guna maksimalnya pembangunan bidang kelautan dan perikanan melalui program dan kegiatan yang efisien dan tepat sasaran serta didukung oleh masyarakat sesuai prioritas dan manfaat dalam mewujudkan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Lamongan.

Dari hal tersebut di atas, usulan program dan kegiatan Dinas Perikanan pada tahun 2019 disusun berdasarkan aspirasi dari masyarakat serta para pemangku kepentingan dengan usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat seperti :

a) Pengadaan sarana dan prasarana produksi garam
b) Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Garam
c) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir
d) Bantuan Alat dan Benih Perikanan Untuk Masyarakat/Kelompok Masyarakat
e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya

f) Pendampingan Kelompok Perikanan Budidaya
g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
h) Peningkatan Mutu Nilai Tambah
i) Sosialisasi dan Promosi GEMARIKAN
j) Fasilitasi Akses Permodalan

Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel 2.4 sebagaimana berikut:

Tabel 2.4
Tabel Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2019
(terlampir)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perikanan sebagai Pelaksana dan Pendukung serta pelaksana tugas desentralisasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Lamongan. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

   Arah Kebijakan :

   a. Mempercepat pengurangan kemisikian;
   b. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
   d. Meningkatkan tata kelola layanan dasar
   e. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;

2. Prioritas Nasional 2 : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

   Arah Kebijakan :

   a. Meningkatkan konektivitas;
   b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;
   c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa;
   d. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sector unggulan hulu-hilir perikanan

3. Prioritas Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

   Arah Kebijakan :

   a. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil

pertanian, perikanan dan kehutanan;

b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
c. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
e. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah

4. Prioritas Nasional 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya Air

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan produksi energy primer;
b. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy;
c. Meningkatkan aksesbilitas energy;
d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energy dan listrik;
e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
g. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
j. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya;
k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS;
m. Meningkatkan kesadaran terkait sumber day air

5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber;
b. Menjamin kesuksesan Pemili;

c. Memperkuat pertahanan wilayah nasional;
d. Meningkatkan kepastian hokum dan Reformasi Birokrasi;
e. Memperkuat efektivitas diplomasi

Dari 5 Priortas Nasional yang tercantum dalam RKP tahun 2019, Dinas Perikanan Kabupaten Dalam perencanaan program dan kegiatannya di Tahun 2019 berperan aktif ke dalam 4 prioritas nasional sebagai berikut yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan Energi, pangan dan sumber daya air

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah :

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berperan dalam misi yang ke 2 di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yaitu :

"Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah"

Kebijakan pembangunan sector perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan di atas diambil dalam rangka memajukan serta mengembangkan sector perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan secara berkesinambungan serta ramah lingkungan dengan mengacu pada konsep blue ekonomi yaitu konsep pengelolaan lingkungan secara baik dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut juga sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi jatim dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta mewujudkan masyarakat perikanan di Kabupaten Lamongan yang berdaya saing.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2016, yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Perikanan dan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
	3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Pembudidaya dan Nelayan)	Indeks Harga Yang Diterima Petani (Pembudidaya dan Nelayan)

Adapun target Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai pada tahun 2019 terdapat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran
Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
(terlampir)

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan

Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

(terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu "**Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"** ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan berperan dalam misi ke 2 (dua) yaitu "Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah serta berperan dalam Tujuan ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat"

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pencapaian mewujudkan masyarakat lamongan khususnya masyarakat pelaku sektor perikanan dan kelautan untuk lebih sejahtera dan berdaya saing.

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
(terlampir)

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
(terlampir)

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana table rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting serta berfungsi sebagai pedoman guna memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten LamonganTahun 2019, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya sebagai panduan keselarasan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Semoga Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat mencapai visi dan misi dalam pencapaian tujuan pembangunan sector perikanan di Kabupaten Lamongan. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen Renja tahun 2019.